

Gratispol Jadi yang Pertama di Indonesia Ambisi Rudy-Seno Mengejar Keteringgalan Pendidikan di Kaltim



(Sumber gambar: kaltimpost.co.id) Minggu, 08/06/2025

EKONOMI Kaltim hingga tahun ini masih ‘dinabobokan’ pada hasil dari sumber daya alam (SDA). Di tengah rekor APBD Kaltim sejak tahun lalu yang menembus angka di atas Rp20 triliun, berbagai persoalan sektor yang menyentuh langsung sendi kehidupan masyarakat belum sepenuhnya tuntas. Pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan masih menunjukkan ketimpangan.

Khusus di sektor pendidikan, gambaran kontras tersebut ditemukan pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Saat kampanye di berbagai daerah di Kaltim dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 lalu.

Seno, yang saat itu sebagai calon wakil gubernur mendapatkan kenyataan pahit. Masih banyak anak-anak di Kaltim yang terpaksa putus sekolah. Memilih bekerja apa adanya untuk membantu ekonomi orangtua, daripada meneruskan sekolah.

"Itu menjadi kondisi yang miris bagi kami (Rudy-Seno) saat itu. Dan *flashback* saya ketika menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim, kami melihat ada anggaran yang cukup. Saya berdiskusi dengan Pak Rudy kala itu sebagai calon gubernur. Ingin mengangkat SDM (sumber daya manusia) Kaltim. Maka lahirlah Gratispol ini," ucap Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, membuka diskusi dalam Rembuk Etam bertema "Gratispol: Menakar Kontribusinya pada Pencapaian Asta Cita" di Studio Balikpapan Televisi, Rabu (4/6).

Fakta di lapangan tersebut juga tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) Kaltim yang masih di angka 72,37 persen untuk tingkat SMA/SMK/MA. Karena itu, Seno menilai, Kaltim yang selama ini kaya dan bergantung pada SDA batu bara dan mineral, yang bisa habis, harus segera bertransformasi dengan mengangkat SDM-nya.

"Dengan Gratispol pendidikan gratis ini juga selaras dengan program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Kami bekerja keras agar anak-anak Kaltim ini (APM SMA/SMK-nya) bisa 100 persen. Dari yang rata-rata usia sekolah itu 10 tahun, menjadi minimal 12 tahun. Setelah dikalkulasi, ternyata anggaran di Kaltim juga cukup sampai pendidikan gratis hingga S-3," ungkap Seno.

Keinginan meningkatkan rata-rata usia sekolah tersebut, agar anak muda Kaltim bisa mengejar provinsi lain di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Bahkan bisa setara Malaysia, Singapura atau Brunei Darussalam. Hitung ulang menunjukkan anggaran yang cukup. Dibantu tim transisi, pakar dan organisasi perangkat daerah, tahun ini Seno menyebut, anggaran awal mampu meng-cover 33 ribu mahasiswa.

"Dan meningkat menjadi 128 ribu orang yang akan dibiayai tahun 2026. Pada Juli ini kami akan mulai pembayaran. Tidak hanya negeri, tapi juga swasta. Dari sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Memang besar anggarannya, namun kita mampu," ujar Seno.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltim sebagai tahap awal telah menyediakan anggaran Rp750 miliar. Tahun depan, Pemprov akan menyisihkan Rp2,1 triliun dari APBD 2026. Anggaran itu untuk memuluskan jalannya program pendidikan gratis mulai jenjang SMA/SMK hingga S-3.

"Gratispol ini sebagai fondasi baru. Dari *zero to hero* punya proses panjang. Selama 100 hari kerja kami jadikan sebagai tapak fondasi dan setelahnya pasti ada evaluasi. Termasuk melalui perubahan peraturan gubernur. Melalui Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terbaru, semoga pendidikan gratis ini segera menjadi kebijakan nasional," kata Seno.

MENJADI PIJAKAN NASIONAL

Program Gratispol pendidikan gratis pada era Rudy-Seno disebut menjadi yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Hingga membuat Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof Warsito memberikan apresiasi yang tinggi terhadap program ini.

"Kami dari pemerintah pusat tentu mengapresiasi program Gratispol yang dicanangkan gubernur-wakil gubernur Kaltim (Rudy-Seno). Khususnya pendidikan gratis ini sangat selaras dengan program pusat. Di mana baru-baru ini MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan tentang bagaimana aspirasi pendidikan gratis di pendidikan dasar," ungkap Warsito yang hadir secara sambungan daring.

"Sekarang masih sedang kami kaji terkait desain anggarannya. Kaltim sudah jauh melangkah lebih maju. Itu barangkali akan menjadi contoh provinsi lain," tambahnya.

Baginya, kata dia, terpenting dari program Gratispol adalah bisa berinteraksi dengan lima dimensi. Yakni sekolah, lingkungan masyarakat, keluarga, tempat ibadah, dan dunia maya. Itu harus digarap bersama secara paralel.

"Itu yang kami titipkan. Siswa tidak hanya mengejar soal nilai akademis tapi juga nilai hidup. Kami menyebutnya NFT (*non-fungible* token). Di sisi lain itu terpenting adalah pendidikan karakter sebagai pintu. Jadi kekhasan pendidikan di Kaltim. Kami mendukung Kaltim Etam Berkarakter. Gratispol ini menjadi kuncinya," bebernya.

HARUS DIKAWAL DAN *BY DESIGN*

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi menilai Program Gratispol, pendidikan gratis jangan hanya dimaknai sebagai jargon kampanye atau program populis dari pemerintahan Rudy-Seno.

Melainkan lebih dari itu, jika melihat tata urutan Program Asta Cita Prabowo-Gibran, maka di poin keempat ada cita-cita besar presiden untuk memperkuat pembangunan SDM Indonesia.

"Pasangan Rudy-Seno ternyata mampu mewujudkan visi presiden tersebut dalam Program Gratispol ini. Harus diingat, program ini adalah janji politik yang sangat mudah untuk dievaluasi. Salah satunya melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Yang salah satu indikatornya itu pendidikan," ungkap Darlis.

Di sisi lain yang menjadi perhatiannya, dengan hadirnya Gratispol yang membiayai uang kuliah tunggal (UKT), maka dirinya memandang perlu dioptimalkan dukungan kepada Pemprov Kaltim dari *stakeholders* lain. Di mana di Komisi IV DPRD Kaltim mendorong kepada perusahaan yang memiliki program *corporate social responsibility* (CSR) tidak lagi memberikan beasiswa berupa UKT.

"Kami mengarahkan, dengan Gratispol untuk UKT, maka perusahaan yang memiliki CSR bisa memberikan ke sektor lain. Karena komponen pendidikan ada banyak. Termasuk biaya hidup mahasiswa. Jangan sampai ada duplikasi. Sehingga mahasiswa kita bisa kuliah dengan tenang tanpa harus memikirkan keuangan lain," terang Darlis.

Sementara itu, Ketua IKA UB Kaltim Myrna Safitri menyebut, Gratispol sebagai program yang luar biasa. Menjadi pijakan arah yang harus dikawal agar tetap berada di jalur tujuannya. Setidaknya lima tahun ke depan pemerintahan Rudy-Seno.

Dengan meningkatnya pendidikan, maka muaranya kepada lapangan pekerjaan. Karena itu, Myrna menekankan, permintaan terhadap tenaga kerja sesuai bidangnya harus bisa jadi indikator yang dievaluasi dalam program Gratispol ini.

Mengingat tidak hanya Kaltim, IKN pun saat ini memiliki berbagai sektor yang sangat memerlukan tenaga kerja. Termasuk ahli yang mampu terserap di berbagai bidang industri yang sedang dibangun untuk mendukung IKN.

"Mau tidak mau segalanya saat ini harus *by design*. Dengan pembangunan IKN yang salah satunya membangun enam klaster industri, bisa tidak lima tahun berjalan ini kita bisa mencetak ahli. Misal ahli terkait gasifikasi batu bara yang nanti industrinya ada di Samarinda. Sementara saat ini sangat sulit ditemukan ahli tersebut di Indonesia," ungkap Deputy Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) itu. Selain itu, dirinya juga mendorong Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kompetensi aparat pemerintah khususnya di desa dan kelurahan. Mengingat untuk mencapai sebuah visi dan misi yang besar dari Rudy-Seno saat ini, maka diperlukan kemampuan yang lebih dari aparat pemerintahan di bawahnya.

"Aparat desa hingga ASN itu perlu disekolahkan lebih untuk bisa mengimbangi dan mampu menerapkan *public policy* yang saat ini dibangun. Dan Kaltim ini mampu bermimpi besar karena memang uangnya ada. Selain itu bagaimana semakin banyak anak-anak Kaltim ini bisa merasakan ekosistem kelas dunia," ucapnya. (rdh/rd)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Gratispol Jadi yang Pertama di Indonesia, 08/06/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi (Pergub Kaltim 24/2025) dijelaskan antara lain sebagai berikut.
 - a. angka 8
Bantuan biaya pendidikan tinggi adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa jenjang diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, sub-spesialis dan doktor, dalam rangka meringankan beban dalam memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa untuk membantu menutupi sebagian atau seluruh biaya yang terkait dengan pendidikan yang ditempuh.
 - b. angka 12
Program Pendidikan Gratispol adalah beasiswa dan/atau stimulan yang diberikan kepada mahasiswa atau peserta didik asal Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
2. Dalam Pasal 4 Pergub Kaltim 24/2025 diatur sebagai berikut.
 - (1) Sasaran penerima Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Mahasiswa yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur serta menempuh pendidikan tinggi pada semua jenjang di dalam dan luar daerah dalam negeri/luar negeri;
 - b. Mahasiswa yang secara khusus dikirim atau melalui program khusus atau jalur kerja sama oleh Pemerintah Provinsi untuk menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri; dan
 - c. Mahasiswa yang mendapatkan afirmasi dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
 - (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi diprioritaskan bagi:
 - a. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial, yaitu mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang;
 - b. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan khusus, yaitu mahasiswa dengan keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas dan mahasiswa dengan keterbatasan akses seperti dari daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T); dan
 - c. Mahasiswa berprestasi yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) pada skala 4.00 (empat koma nol nol) atau non akademik yang dibuktikan dengan piagam penghargaan lomba akademik atau non akademik.